



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI PURWOKO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGARAJA
3. NHK : 798224

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.506.800.000**

1. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 704 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 1141 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. Tanah Seluas 744 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 546.400.000
5. Tanah Seluas 445 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 267.000.000
6. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 143.400.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 452 m2/70 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, LAINNYA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **653.000.000**

1. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA GUNUNG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA CBR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.



12.000.000

4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

270.000.000

5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 187.336.618

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.757.233.702

F. HARTA LAINNYA

Rp. 520.700.000

Sub Total

Rp. 5.625.070.320

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.625.070.320

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.